BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Penelitian

Populasi penelitian ini mencakup seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Jawa dan Sumatera selama periode 2021-2024. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan unit analisis berdasarkan kriteria tertentu. Selain itu, variabel Proyek Strategis Nasional (PSN) diterapkan dalam bentuk *lag* 1 tahun untuk menangkap jeda waktu (*time-lag*) antara pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan dampaknya terhadap peningkatan penerimaan daerah. Kriteria pengambilan sampel sebagai berikut :

Table 4. 1
Pemilihan Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Total pemerintah daerah kab/kota di Pulau Jawa dan Sumatera	268
Pemerintah daerah yang tidak memiliki data Laporan Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah lengkap selama periode 2021-2024	(0)
Pemerintah daerah yang tidak memiliki Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah selesai selama periode 2021-2024	(194)
Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki Proyek Strategis Nasional dengan dampak ekonomi yang tidak dapat diidentifikasi	(2)
Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah kurang dari 25% selama periode 2021-2024	(39)
Jumlah Sampel Penelitian	33

Sumber: Data diolah Peneliti (2026)

Merujuk pada informasi yang disajikan dalam tabel, teridentifikasi 33 Kabupaten/Kota yang terpilih sebagai objek penelitian, yakni :

Table 4. 2
Sampel Penelitian

No	Provinsi	Kabupaten/Kota
1	Lampung	Kota Bandar Lampung
2	Jawa Timur	Kabupaten Pasuruan
3	Jawa Timur	Kota Malang
4	Riau	Kota Pekanbaru
5	Riau	Kota Dumai
6	Banten	Kabupaten Serang
7	Sumatera Selatan	Kota Palembang
8	Banten	Kota Tangerang
9	Sumatera Utara	Kota Medan
10	Sumatera Utara	Kabupaten Deli Serdang
11	DKI Jakarta	DKI Jakarta
12	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kota Yogyakarta
13	Jawa Tengah	Kota Semarang
14	Jawa Timur	Kabupaten Sidoarjo
15	Jawa Timur	Kota Surabaya
16	Jawa Timur	Kabupaten Gresik
17	Jawa Barat	Kabupaten Bogor
18	Banten	Kabupaten Tangerang
19	Jawa Barat	Kota Cirebon
20	Jawa Barat	Kabupaten Purwakarta
21	Jawa Tengah	Kabupaten Semarang
22	Jawa Tengah	Kota Surakarta
23	Jawa Barat	Kota Depok
24	Jawa Barat	Kota Bogor
25	Jawa Timur	Kota Probolinggo
26	Banten	Kota Tangerang Selatan
27	Jawa Barat	Kabupaten Bekasi
28	Jawa Barat	Kota Bekasi
29	Kepulauan Riau	Kota Batam
30	Jawa Barat	Kabupaten Karawang
31	Jawa Barat	Kabupaten Bandung Barat
32	Jawa Barat	Kota Bandung
33	Jawa Timur	Kabupaten Tulungagung

Sumber: Data diolah Peneliti (2026) (Lampiran A.2)

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data terlebih dahulu diuji normalitasnya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa residual dari 132 observasi

belum berdistribusi normal, sehingga dilakukan penanganan *outlier* menggunakan metode *trimming* berdasarkan *standardized residual* secara bertahap hingga diperoleh residual yang memenuhi asumsi normalitas. Proses tersebut menghasilkan 120 observasi yang digunakan dalam seluruh pengujian selanjutnya.

4.1.2 Hasil Analisis Data

4.1.2.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian melalui nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Hasil analisis ini digunakan untuk memahami kondisi data sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut.

Table 4. 3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	LN_PAD	LN_PAJAK	LN_RETRIBUSI	PSN
Mean	7.246653	6.8798890	4.193602	0.441667
Median	7.137264	6.826754	3.931375	0.000000
Maximum	10.83451	10.70208	7.062894	4.000000
Minimum	5.254365	3.953741	2.359910	0.000000
Std. Dev.	0.978339	1.137703	1.051629	0.695675
Skewness	1.290697	0.658240	0.643533	2.013955
Kurtosis	6.299096	5.357277	2.668358	8.649481
Jarque-Bera	87.73817	36.44937	8.832615	240.7035
Probability	0.000000	0.000000	0.012079	0.000000
Sum	869.5983	825.5868	503.2322	53.00000
Sum Sq. Dev.	113.9004	154.0298	131.6049	57.59167
Observations	120	120	120	120

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 13, 2026

Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa penelitian ini menggunakan 120 observasi data panel yang berasal dari 33 kabupaten/kota selama periode 2021-2024. Variabel

PAD, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (ln), sedangkan variabel PSN menggunakan nilai asli berupa jumlah proyek. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, diperoleh gambaran karakteristik data sebagai berikut:

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai mean sebesar 7,246653, median 7,137264, nilai maksimum 10,834510, dan nilai minimum 5,254365. Standar deviasi sebesar 0,978339 menunjukkan adanya variasi kapasitas fiskal antar kabupaten/kota dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. Nilai mean yang lebih besar dibandingkan standar deviasi mengindikasikan bahwa sebaran data relatif baik dan tidak menunjukkan penyimpangan yang terlalu tinggi.
2. Variabel Pajak Daerah memiliki nilai mean sebesar 6,879890, median 6,826754, nilai maksimum 10,702080, nilai minimum 3,953741, dan standar deviasi sebesar 1,137703. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah memiliki variasi yang cukup tinggi antar daerah, sekaligus menegaskan perannya sebagai komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Variabel Retribusi Daerah memiliki nilai mean sebesar 4,193602, median 3,931375, nilai maksimum 7,062894, nilai minimum 2,359910, dan standar deviasi sebesar 1,051629. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Retribusi Daerah terhadap penerimaan daerah relatif terbatas.
4. Variabel Proyek Strategis Nasional memiliki nilai mean sebesar 0,441667, median 0,000000, nilai maksimum 4,000000, nilai minimum 0,000000, dan standar deviasi sebesar 0,695675. Nilai median sebesar nol menunjukkan bahwa sebagian besar observasi tidak memiliki tambahan PSN pada tahun tertentu.

Selain itu, nilai skewness sebesar 2,013955 dan kurtosis sebesar 8,649481 mengindikasikan bahwa distribusi data PSN cenderung menceng ke kanan (*positively skewed*) dan terkonsentrasi pada sebagian kecil daerah.

4.1.3 Metode Estimasi Regresi Data Panel

4.1.3.1 *Common Effect Model* (CEM)

Common Effect Model (CEM) merupakan model regresi data panel yang mengasumsikan seluruh unit cross-section memiliki karakteristik yang homogen, sehingga perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota maupun periode pengamatan tidak diperhitungkan dalam model. Model ini menggunakan satu intercept dan koefisien regresi yang sama untuk seluruh unit observasi.

Table 4. 4
Hasil Uji *Common Effect Model* (CEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.159818	0.015766	454.1365	0.0000
LN_PAJAK_C	0.799709	0.018240	43.84450	0.0000
LN_RETRI_C	0.057867	0.019553	2.959542	0.0037
PSN_C	-0.008066	0.02819	-0.286873	0.7747
PAJAK_PSN	0.059780	0.020929	2.856338	0.0051
RETRI_PSN	-0.041148	0.030699	-1.340355	0.1828

R-squared	0.971953	Mean dependent var	7.246653
Adjusted R-squared	0.970723	S.D. dependent var	0.978339
S.E. of regression	0.167399	Akaike info criterion	-0.688166
Sum squared resid	3.194556	Schwarz criterion	-0.548792
Log likelihood	47.2899	Hannan-Quinn criter.	-0.631566
F-statistic	790.1234	Durbin-Watson stat	0.224988
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 13, 2026

4.1.3.2 *Fixed Effect Model* (FEM)

Fixed Effect Model (FEM) merupakan model regresi data panel yang

mengakomodasi perbedaan karakteristik antar entitas yang tidak teramati (*unobserved heterogeneity*) dan bersifat konstan sepanjang waktu melalui penggunaan intercept yang berbeda pada setiap unit *cross-section*. Sementara itu, koefisien regresi diasumsikan tetap untuk seluruh entitas dan periode pengamatan.

Table 4. 5
Hasil Uji *Fixed Effect Model* (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.171062	0.004284	1674.037	0.0000
LN_PAJAK_C	0.723933	0.028407	25.48460	0.0000
LN_RETRI_C	0.022065	0.005536	3.985924	0.0001
PSN_C	-0.002294	0.006230	-0.368286	0.7136
PAJAK_PSN	0.004876	0.005624	0.866939	0.3885
RETRI_PSN	-0.005380	0.008586	-0.626584	0.5327
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.999158	Mean dependent var		7.246653
Adjusted R-squared	0.998777	S.D. dependent var		0.978339
S.E. of regression	0.034207	Akaike info criterion		-3.660195
Sum squared resid	0.095951	Schwarz criterion		-2.777489
Log likelihood	257.6117	Hannan-Quinn criter.		-3.301724
F-statistic	2628.574	Durbin-Watson stat		2.368878
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 13, 2026

4.1.3.3 *Random Effect Model* (REM)

Random Effect Model (REM) mengasumsikan bahwa perbedaan karakteristik antar entitas bersifat acak dan tercermin dalam komponen *error*. Berbeda dengan FEM, variasi antar entitas tidak dimodelkan melalui perbedaan intercept, melainkan dimasukkan ke dalam *error term* sebagai efek individu yang tidak teramati.

Table 4. 6
Hasil Uji *Random Effect Model* (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.189406	0.023836	301.6158	0.0000
LN_PAJAK_C	0.766665	0.017350	44.18796	0.0000
LN_RETRI_C	0.019547	0.005178	3.775069	0.0003
PSN_C	-0.002092	0.006208	-0.337060	0.7367
PAJAK_PSN	0.007169	0.005583	1.284182	0.2017
RETRI_PSN	-0.007916	0.008496	-0.931749	0.3534
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.135561	0.9401
Idiosyncratic random			0.034207	0.0599
Weighted Statistics				
R-squared	0.939874	Mean dependent var		0.941714
Adjusted R-squared	0.937237	S.D. dependent var		0.175729
S.E. of regression	0.041540	Sum squared resid		0.196716
F-statistic	356.4032	Durbin-Watson stat		1.158584
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.962070	Mean dependent var		7.246653
Sum squared resid	4.320281	Durbin-Watson stat		0.052754

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 13, 2026

4.1.4 Pemilihan Model Regresi Data Panel

4.1.4.1 Uji *Chow*

Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah *Fixed Effect Model* (FEM) lebih tepat dibandingkan *Common Effect Model* (CEM). Uji ini menguji apakah terdapat perbedaan karakteristik tetap antar kabupaten/kota sehingga penggunaan model dengan efek individual memberikan estimasi yang lebih tepat.

Table 4. 7
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	82.752069	(32,82)	0.0000
Cross-section Chi-square	420.643428	32	0.0000

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 13, 2026

Nilai probabilitas Cross-section F sebesar 0,0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga hipotesis nol ditolak. Sehingga model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

4.1.4.2 Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) lebih tepat digunakan dengan menguji ada tidaknya korelasi antara efek individual dan variabel independen.

Table 4. 8
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	45.010725	5	0.0000

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 13, 2026

Hasil menunjukkan nilai probabilitas Chi-square sebesar 0,0000. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak. Sehingga model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

4.1.4.3 Uji *Lagrange Multiplier*

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk membandingkan *Random Effect Model* (REM) dengan *Common Effect Model* (CEM) melalui pengujian apakah terdapat efek acak yang signifikan antar entitas.

Table 4. 9
Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	43.90835 (0.0000)	0.284077 (0.5940)	44.19242 (0.0000)
Honda	6.626337 (0.0000)	-0.532989 (0.7030)	4.308648 (0.0000)
King-Wu	6.626337 (0.0000)	-0.532989 (0.7030)	1.439488 (0.0750)
Standardized Honda	6.960640 (0.0000)	-0.094659 (0.5377)	0.557057 (0.2887)
Standardized King-Wu	6.960640 (0.0000)	-0.094659 (0.5377)	-1.003259 (0.8421)
Gourieroux, et al.	--	--	43.90835 (0.0000)

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 13, 2026

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas Breusch-Pagan Cross-section sebesar 0,0000. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak. Dengan demikian, model Random Effect Model (REM) dinilai lebih tepat digunakan.

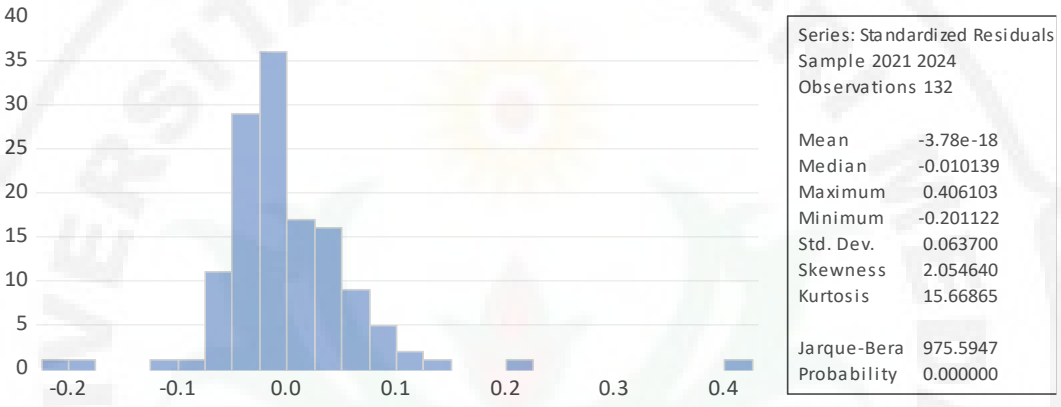
4.1.5 Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji pemilihan model, penelitian ini menggunakan Fixed Effect Model (FEM). Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan hasil estimasi yang diperoleh bersifat valid dan andal.

4.1.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah residual model regresi

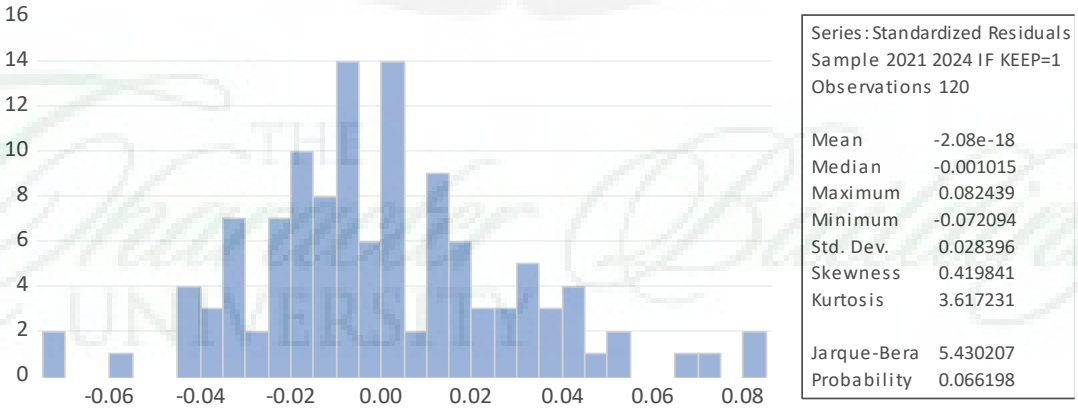
berdistribusi normal sebagai salah satu asumsi dalam analisis regresi. Pengujian dilakukan menggunakan Jarque-Bera Test berdasarkan nilai skewness dan kurtosis residual.



Sumber: Hasil Olah Data Eviews 13, 2026

Gambar 4. 1
Histogram Residual Model Awal

Berdasarkan Gambar 4.1, diperoleh nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,000000, lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa residual belum berdistribusi normal. Oleh karena itu, dilakukan *trimming* terhadap observasi teridentifikasi outlier.



Sumber: Hasil Olah Data Eviews 13, 2026

Gambar 4. 2
Histogram Residual Model Akhir

Berdasarkan Gambar 4.2, diperoleh nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0.066198 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa residual telah berdistribusi normal.

4.1.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model penelitian.

Table 4. 10
Hasil Uji Multikolinearitas

	LN_PAJAK_C	LN_RETRI_C	PSN_C
LN_PAJAK_C	1.000000	0.649875	0.227412
LN_RETRI_C	0.649875	1.000000	0.283537
PSN_C	0.227412	0.283537	1.000000

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 13, 2026

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.10, seluruh nilai korelasi antar variabel independen berada di bawah 0,80. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model penelitian tidak mengalami masalah multikolinearitas.

4.1.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah varians residual dalam model regresi bersifat konstan. Pengujian dilakukan menggunakan Uji Glejser berdasarkan nilai signifikansi masing-masing variabel independen.

Table 4. 11
Hasil Uji Heteroskedastisitas (Glejser Test)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.019981	0.002122	9.414741	0.0000
LN_PAJAK_C	0.016951	0.014127	1.199887	0.2336
LN_RETRI_C	-0.003599	0.002763	-1.302406	0.1963
PSN_C	-0.000964	0.002536	-0.379978	0.7049

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 13, 2026

Berdasarkan Tabel 4.11, seluruh variabel memiliki nilai probabilitas di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

4.1.5.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan mengidentifikasi ada tidaknya korelasi residual antarperiode dalam model regresi yang dapat memengaruhi efisiensi hasil estimasi.

Table 4. 12
Hasil Uji Auto Korelasi

R-squared	0.999158	Mean dependent var	7.246653
Adjusted R-squared	0.998777	S.D. dependent var	0.978339
S.E. of regression	0.034207	Akaike info criterion	-3.660195
Sum squared resid	0.095951	Schwarz criterion	-2.777489
Log likelihood	257.6117	Hannan-Quinn criter.	-3.301724
F-statistic	2628.574	Durbin-Watson stat	2.368878
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 13, 2026

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada Tabel 4.13, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2.368878. Nilai tersebut berada di sekitar angka 2, sehingga mengindikasikan bahwa model regresi tidak mengalami masalah autokorelasi.

4.1.6 Persamaan Regresi Data Panel

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji pemilihan model, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Table 4. 13
Hasil Persamaan Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.

C	7.170819	0.004203	1705.925	0.0000
LN_PAJAK_C	0.724164	0.027980	25.88164	0.0000
LN_RETRI_C	0.021659	0.005473	3.957318	0.0002
PSN_C	-0.002323	0.005024	-0.462447	0.6450

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 13, 2026

Berdasarkan hasil olah data, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$LN_PAD = 7.170819 + 0.724164\ X_1 + 0.021659\ X_2 - 0.002323\ Z$$

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 7,170819 menunjukkan bahwa apabila Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Proyek Strategis Nasional dianggap konstan, maka nilai logaritma Pendapatan Asli Daerah sebesar 7,170819.
2. Koefisien Pajak Daerah sebesar 0,724164 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Pajak Daerah sebesar 1% akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,724164%, dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien Retribusi Daerah sebesar 0,021659 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Retribusi Daerah sebesar 1% akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,021659%, dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Koefisien Proyek Strategis Nasional sebesar - 0,002323 menunjukkan arah hubungan negatif. Namun karena variabel ini tidak signifikan secara statistik, pengaruh langsungnya terhadap PAD tidak dapat disimpulkan.

4.1.7 Analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Untuk menguji apakah Proyek Strategis Nasional mampu memoderasi hubungan antara Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah terhadap PAD, dilakukan pengujian menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA).

Table 4. 14
Hasil Analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.171062	0.004284	1674.037	0.0000
LN_PAJAK_C	0.723933	0.028407	25.48460	0.0000
LN_RETRI_C	0.022065	0.005536	3.985924	0.0001
PSN_C	-0.002294	0.006230	-0.368286	0.7136
PAJAK_PSN	0.004876	0.005624	0.866939	0.3885
RETRI_PSN	-0.005380	0.008586	-0.626584	0.5327

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 13, 2026

Berdasarkan hasil olah data, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{LN_PAD} = 7.171062 + 0.723933\ X_1 + 0.022065\ X_2 - 0.002294\ Z +$$

$$0.004876\ X_1Z - 0.005380\ X_2Z$$

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Koefisien interaksi antara Pajak Daerah dan Proyek Strategis Nasional (X_1Z) sebesar 0,004876 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel interaksi akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,004876. Koefisien positif mengindikasikan bahwa PSN cenderung memperkuat hubungan Pajak Daerah terhadap PAD, namun Namun nilai probabilitas sebesar 0,3885 menunjukkan bahwa penguatan tersebut tidak signifikan.
2. Koefisien interaksi antara Retribusi Daerah dan Proyek Strategis Nasional (X_2Z) sebesar -0,005380 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel interaksi akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,005380. Koefisien negatif mengindikasikan bahwa PSN cenderung memperlemah hubungan Retribusi Daerah terhadap PAD, namun nilai probabilitas sebesar 0,5327 menunjukkan bahwa pelemahan tersebut juga tidak signifikan.

4.1.8 Pengujian Hipotesis

4.1.8.1 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (Uji F) digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel dalam model, termasuk variabel independen, variabel moderasi, dan variabel interaksi, secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Table 4. 15
Hasil Uji Simultan (Uji F)

R-squared	0.999158	Mean dependent var	7.246653
Adjusted R-squared	0.998777	S.D. dependent var	0.978339
S.E. of regression	0.034207	Akaike info criterion	-3.660195
Sum squared resid	0.095951	Schwarz criterion	-2.777489
Log likelihood	257.6117	Hannan-Quinn criter.	-3.301724
F-statistic	2628.574	Durbin-Watson stat	2.368878
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 13, 2026

Berdasarkan hasil estimasi, diperoleh nilai Prob (F-statistic) sebesar 0,0000, yang secara signifikan lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap PAD.

4.1.8.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji signifikansi parsial (Uji t) digunakan untuk menguji pengaruh setiap variabel dalam model terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara individual.

Table 4. 16
Hasil Uji Signifikansi Parsial Regresi Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.170819	0.004203	1705.925	0.0000
LN_PAJAK_C	0.724164	0.027980	25.88164	0.0000
LN_RETRI_C	0.021659	0.005473	3.957318	0.0002
PSN_C	-0.002323	0.005024	-0.462447	0.6450

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 13, 2026

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (H1).

   Variabel Pajak Daerah memiliki nilai t-statistic sebesar 25.88164 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 < 0,05, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, H1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sehingga semakin tinggi penerimaan Pajak Daerah maka semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah yang dapat dihimpun pemerintah daerah.

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (H2).

   Variabel Retribusi Daerah memiliki nilai t-statistic sebesar 3.957318 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0002 < 0,05, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, H2 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa Retribusi Daerah turut memberikan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, meskipun kontribusinya relatif lebih kecil dibandingkan Pajak Daerah.

Table 4. 17
Hasil Uji Signifikansi Parsial Moderated Regression Analysis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.171062	0.004284	1674.037	0.0000
LN_PAJAK_C	0.723933	0.028407	25.48460	0.0000
LN_RETRI_C	0.022065	0.005536	3.985924	0.0001
PSN_C	-0.002294	0.006230	-0.368286	0.7136
PAJAK_PSN	0.004876	0.005624	0.866939	0.3885
RETRI_PSN	-0.005380	0.008586	-0.626584	0.5327

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 13, 2026

1. Proyek Strategis Nasional dalam Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah terhadap

Pendapatan Asli Daerah (H3).

Variabel interaksi antara Pajak Daerah dan Proyek Strategis Nasional memiliki nilai t-statistic sebesar 0,866939 dengan nilai probabilitas sebesar 0,3885 > 0,05, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, H3 ditolak. Meskipun koefisien interaksi menunjukkan arah positif, hasil tersebut mengindikasikan bahwa Proyek Strategis Nasional belum mampu memoderasi atau memperkuat pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara signifikan.

2. Proyek Strategis Nasional dalam Memoderasi Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (H4).

   Variabel interaksi antara Retribusi Daerah dan Proyek Strategis Nasional memiliki nilai t-statistic sebesar -0,626584 dengan nilai probabilitas sebesar 0,5327 > 0,05, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, H4 ditolak. Meskipun koefisien interaksi menunjukkan arah negatif, hasil tersebut mengindikasikan bahwa Proyek Strategis Nasional belum mampu memoderasi pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara signifikan.

4.1.8.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan seluruh variabel dalam model, yaitu variabel independen, variabel moderasi, dan variabel interaksi, dalam menjelaskan variasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Table 4. 18
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.999158	Mean dependent var	7.246653

Adjusted R-squared	0.998777	S.D. dependent var	0.978339
S.E. of regression	0.034207	Akaike info criterion	-3.660195
Sum squared resid	0.095951	Schwarz criterion	-2.777489
Log likelihood	257.6117	Hannan-Quinn criter.	-3.301724
F-statistic	2628.574	Durbin-Watson stat	2.368878
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 13, 2026

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 4.16, diperoleh nilai Adjusted R-squared sebesar 0,998777. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 99,88% variasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dijelaskan oleh variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Proyek Strategis Nasional, serta variabel interaksi yang digunakan dalam model penelitian. Sementara itu, 0,12% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak dimasukkan dalam analisis.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai probabilitas Pajak Daerah sebesar 0,0000, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga hipotesis pertama diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan Pajak Daerah diikuti oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sehingga mengindikasikan adanya keterkaitan yang kuat antara optimalisasi penerimaan pajak dan penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Secara ekonometrika, koefisien regresi Pajak Daerah sebesar 0,724164 mengindikasikan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh positif yang relatif kuat dalam menjelaskan variasi Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota yang menjadi objek penelitian.

Meskipun Pajak Daerah terbukti memiliki pengaruh yang kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah, temuan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa pengelolaan penerimaan perpajakan di daerah telah berjalan secara optimal. Hasil penelitian ini hanya mengindikasikan bahwa Pajak Daerah masih menjadi sumber utama pembentuk PAD, sementara potensi perpajakan yang tersedia belum tentu telah dimanfaatkan secara maksimal. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala, seperti lemahnya pendataan objek pajak, rendahnya kepatuhan wajib pajak, berkembangnya aktivitas ekonomi digital yang belum sepenuhnya teridentifikasi dalam sistem perpajakan daerah, serta besarnya sektor informal yang belum menjadi basis pemungutan pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya aktivitas ekonomi, tetapi juga oleh efektivitas tata kelola perpajakan pemerintah daerah dalam mengubah potensi ekonomi menjadi penerimaan riil.

Pada konteks kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Sumatera, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih didominasi oleh penerimaan Pajak Daerah sebagai komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan kapasitas fiskal daerah masih sangat dipengaruhi oleh kinerja penerimaan pajak. Apabila terjadi perlambatan ekonomi, penurunan konsumsi masyarakat, atau penurunan aktivitas usaha, penerimaan Pajak Daerah berpotensi ikut menurun dan secara langsung memengaruhi kemampuan fiskal pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus mengoptimalkan pengelolaan Pajak Daerah sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber-sumber PAD lainnya agar struktur penerimaan daerah menjadi

lebih kuat dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Astuti dan Kartika (2024) serta Ravikatul Jannati dan Elsa Meirina (2025) yang sama-sama membuktikan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kesamaan temuan tersebut menunjukkan bahwa Pajak Daerah secara konsisten menjadi sumber utama penerimaan daerah pada berbagai objek dan periode penelitian. Selain memperkuat hasil penelitian terdahulu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa besarnya kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD mencerminkan pentingnya penguatan administrasi perpajakan dan optimalisasi pengelolaan potensi pajak untuk mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Hasil penelitian ini mengonfirmasi *Agency Theory* yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai agen memiliki tanggung jawab mengelola potensi penerimaan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah pusat sebagai prinsipal. Pengaruh positif Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah secara umum mampu mengelola potensi perpajakan sehingga dapat dimobilisasi menjadi penerimaan daerah. Temuan ini juga sejalan dengan konsep *information asymmetry* dalam *Agency Theory*, yang menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih luas mengenai potensi dan basis pajak dibandingkan prinsipal. Oleh karena itu, efektivitas pendataan objek pajak, administrasi perpajakan, transparansi, serta pengawasan menjadi faktor penting agar potensi perpajakan dapat dikonversi secara optimal menjadi Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini juga mengonfirmasi *Stewardship Theory* yang

memandang pemerintah daerah sebagai *steward* yang bertanggung jawab mengelola sumber daya publik untuk kepentingan masyarakat. Pengaruh positif Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa pemanfaatan kewenangan perpajakan yang efektif mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah sekaligus memperkuat pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan. Temuan ini memperkuat asumsi *Stewardship Theory* bahwa pengelolaan sumber daya publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dapat mendorong peningkatan kinerja fiskal daerah secara berkelanjutan.

4.2.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai probabilitas Retribusi Daerah sebesar 0,0002, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga hipotesis kedua diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan Retribusi Daerah diikuti oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sehingga mengindikasikan adanya keterkaitan antara efektivitas penyelenggaraan layanan publik dan penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Secara ekonometrika, koefisien regresi Retribusi Daerah sebesar 0,021659 menunjukkan bahwa pengaruh Retribusi Daerah relatif lebih kecil dibandingkan Pajak Daerah, sehingga kontribusinya dalam menjelaskan variasi Pendapatan Asli Daerah juga cenderung lebih terbatas.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga mampu menghasilkan penerimaan daerah melalui pemanfaatan aset,

fasilitas, dan jasa pelayanan yang menjadi objek retribusi. Meskipun demikian, kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah masih sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan pelayanan publik. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala, seperti kualitas infrastruktur pelayanan yang belum memadai, rendahnya tingkat pemanfaatan fasilitas publik, keterbatasan inovasi dalam pengelolaan aset daerah, belum optimalnya digitalisasi pelayanan, serta rendahnya kesadaran masyarakat memanfaatkan layanan objek retribusi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Daerah tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya pemanfaatan layanan publik, tetapi juga oleh efektivitas pengelolaan aset daerah, administrasi penerimaan, dan kualitas tata kelola pelayanan publik.

Pada kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Sumatera, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Retribusi Daerah masih berperan sebagai sumber penerimaan pendukung dalam struktur Pendapatan Asli Daerah. Hal ini mencerminkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui retribusi tidak hanya ditentukan oleh besarnya tarif yang dikenakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas serta mengelola aset daerah secara produktif. Semakin optimal pengelolaan aset, fasilitas, dan jasa pelayanan tersebut, semakin besar peluang pemerintah daerah meningkatkan penerimaan retribusi secara berkelanjutan sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Astuti dan Kartika (2024) yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas

Retribusi Daerah dipengaruhi oleh karakteristik daerah, tingkat aktivitas ekonomi, kualitas layanan publik, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola objek retribusi. Sebaliknya, hasil penelitian ini sejalan dengan Jannati dan Meirina (2025) yang menemukan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kesamaan temuan tersebut menunjukkan bahwa Retribusi Daerah dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang penting apabila didukung oleh kualitas pelayanan publik dan pengelolaan aset daerah yang efektif. Selain memperkuat hasil penelitian terdahulu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaruh signifikan Retribusi Daerah mencerminkan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas pengelolaan aset daerah, serta optimalisasi administrasi penerimaan dalam mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Hasil penelitian ini mengonfirmasi *Agency Theory* yang memandang pemerintah daerah sebagai agen yang bertanggung jawab mengelola pelayanan publik serta sistem pemungutan retribusi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah pusat sebagai prinsipal. Pengaruh positif Retribusi Daerah terhadap PAD menunjukkan bahwa pemerintah daerah secara umum mampu mengelola potensi retribusi sehingga dapat dimobilisasi menjadi penerimaan daerah. Temuan ini juga sejalan dengan konsep *information asymmetry* dalam *Agency Theory*, yang menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih luas mengenai pengelolaan aset, fasilitas, serta objek retribusi dibandingkan masyarakat maupun pemerintah pusat. Oleh karena itu, efektivitas administrasi penerimaan, pengawasan pemungutan, transparansi, dan evaluasi

pengelolaan layanan publik menjadi faktor penting agar potensi Retribusi Daerah dapat dikonversi secara optimal menjadi Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini juga mengonfirmasi *Stewardship Theory* yang memandang pemerintah daerah sebagai *steward* yang bertanggung jawab mengelola sumber daya publik untuk kepentingan masyarakat. Pengaruh positif Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan aset daerah yang efektif mampu mendorong optimalisasi penerimaan retribusi. Temuan ini memperkuat asumsi *Stewardship Theory* bahwa pemerintah daerah yang berorientasi pada pelayanan publik tidak hanya mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, tetapi juga memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui pengelolaan Retribusi Daerah secara berkelanjutan.

4.2.3 Proyek Strategis Nasional dalam Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) memoderasi pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai probabilitas variabel interaksi antara Pajak Daerah dan PSN sebesar 0,3885, lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga hipotesis ketiga ditolak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan Proyek Strategis Nasional belum mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara ekonometrika, koefisien interaksi sebesar 0,004876 menunjukkan arah moderasi yang positif, namun besarnya koefisien tersebut relatif sangat kecil dan tidak

signifikan secara statistik, sehingga kecenderungan penguatan hubungan tersebut belum didukung oleh bukti empiris yang memadai.

Secara teoritis, pembangunan infrastruktur berskala besar seharusnya mampu memperluas basis perpajakan melalui peningkatan investasi, aktivitas usaha, mobilitas barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar proyek yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan PSN belum mampu ditransformasikan secara signifikan menjadi peningkatan penerimaan Pajak Daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa manfaat ekonomi PSN belum sepenuhnya terintegrasi dengan perekonomian lokal karena sebagian besar proyek bersifat padat modal serta melibatkan pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun korporasi besar sebagai pelaksana utama. Selain itu, aktivitas pembangunan juga sering kali didominasi oleh kontraktor nasional, tenaga kerja dari luar daerah, serta rantai pasok yang tidak berbasis pada pelaku usaha lokal, sehingga perluasan aktivitas ekonomi belum secara optimal menciptakan tambahan basis Pajak Daerah.

Di sisi lain, pembangunan PSN juga berpotensi mengubah struktur ekonomi daerah melalui alih fungsi lahan untuk pembangunan jalan tol, kawasan industri, pelabuhan, maupun proyek hilirisasi sumber daya alam. Perubahan tersebut tidak selalu diikuti oleh berkembangnya aktivitas ekonomi lokal yang menjadi objek Pajak Daerah. Dalam beberapa kasus, pembangunan bahkan memunculkan konflik agraria, persoalan kompensasi lahan, tekanan terhadap lingkungan, serta keterlibatan masyarakat lokal yang masih terbatas dalam aktivitas ekonomi baru.

Akibatnya, manfaat ekonomi yang dihasilkan PSN lebih banyak tercermin pada peningkatan investasi dan aktivitas korporasi berskala besar dibandingkan perluasan basis penerimaan Pajak Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mengharapkan pembangunan proyek strategis mampu menciptakan manfaat ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan daerah melalui berkembangnya aktivitas ekonomi dan objek Pajak Daerah, seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) maupun Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa harapan tersebut belum terwujud secara empiris. Ketidaksesuaian tersebut juga dipengaruhi oleh terbatasnya ruang fiskal pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan memungut jenis Pajak Daerah yang telah ditetapkan dalam regulasi sehingga tidak memiliki fleksibilitas untuk menangkap seluruh tambahan aktivitas ekonomi yang dihasilkan PSN menjadi Pajak Daerah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Proyek Strategis Nasional saja belum cukup untuk memperkuat pengaruh Pajak Daerah terhadap PAD. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi yang dihasilkan PSN belum sepenuhnya menciptakan tambahan basis Pajak Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Akibatnya, manfaat pembangunan strategis lebih banyak tercermin pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi dibandingkan pada penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Firdaus Finuliyah dan Moh. Khusaini (2022), Iwan Harsono et al. (2024), serta Lina Afriyana et al. (2023) yang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak selalu diikuti oleh peningkatan penerimaan pemerintah daerah karena manfaat ekonominya belum sepenuhnya terintegrasi dengan perekonomian lokal. Sebaliknya, hasil ini berbeda dengan Sihombing et al. (2024) serta Omodero dan Igodo (2024) yang menemukan bahwa pembangunan infrastruktur mampu meningkatkan penerimaan pajak pemerintah. Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa dampak fiskal pembangunan tidak bersifat seragam, melainkan bergantung pada karakteristik proyek dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan aktivitas ekonomi yang dihasilkan menjadi sumber penerimaan daerah. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa keberadaan PSN dalam penelitian ini belum mampu memperkuat pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini mengonfirmasi *Agency Theory* yang menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah pusat berorientasi pada percepatan investasi, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan pemerintah daerah berkepentingan meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pajak Daerah. Ketika manfaat pembangunan lebih banyak tercermin pada peningkatan investasi daripada perluasan basis Pajak Daerah, maka manfaat fiskal yang diterima pemerintah daerah menjadi tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan secara nasional belum tentu diikuti oleh peningkatan

kapasitas fiskal daerah apabila tidak didukung oleh mekanisme yang mampu menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan Pajak Daerah.

Sementara itu, hasil penelitian ini belum sepenuhnya mengonfirmasi *Stewardship Theory*. Dalam perspektif *Stewardship Theory*, pembangunan seharusnya menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Namun, tidak signifikannya pengaruh moderasi PSN menunjukkan bahwa pembangunan strategis nasional belum mampu memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah melalui perluasan basis Pajak Daerah. Dengan demikian, keberhasilan PSN tidak hanya perlu diukur dari besarnya nilai investasi maupun penyelesaian proyek, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan manfaat ekonomi yang terdistribusi kepada daerah dan mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah secara berkelanjutan.

4.2.4 Proyek Strategis Nasional dalam Memoderasi Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) memoderasi pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai probabilitas variabel interaksi antara Retribusi Daerah dan PSN sebesar 0,5327, lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga hipotesis keempat ditolak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan Proyek Strategis Nasional belum mampu memperkuat maupun memperlemah pengaruh Retribusi Daerah terhadap PAD. Secara ekonometrika, koefisien interaksi sebesar -0,005380 menunjukkan arah

moderasi yang negatif, namun besarnya koefisien tersebut relatif kecil dan tidak signifikan secara statistik, sehingga kecenderungan pelemahan hubungan tersebut belum didukung oleh bukti empiris yang memadai.

Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang timbul karena adanya penggunaan jasa atau pemanfaatan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, peningkatan investasi, mobilitas, maupun aktivitas ekonomi akibat pembangunan PSN tidak secara otomatis meningkatkan penerimaan retribusi. Manfaat pembangunan baru akan tercermin apabila aktivitas ekonomi tersebut benar-benar meningkatkan pemanfaatan pasar daerah, terminal, tempat parkir, pelayanan perizinan, objek wisata milik daerah, maupun fasilitas publik lainnya yang menjadi objek pemungutan retribusi. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi tersebut belum terjadi secara nyata.

Kondisi tersebut dapat dijelaskan oleh karakteristik sebagian besar PSN yang didominasi oleh pembangunan jalan tol, kawasan industri, pelabuhan, bendungan, serta proyek hilirisasi yang dikelola oleh pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun badan usaha pelaksana. Karakteristik proyek yang cenderung bersifat enclave economy menyebabkan manfaat ekonomi lebih banyak terkonsentrasi pada kawasan proyek dan aktivitas korporasi dibandingkan menyebar ke perekonomian lokal. Akibatnya, peningkatan aktivitas ekonomi yang dihasilkan PSN belum diikuti oleh meningkatnya pemanfaatan layanan dan fasilitas publik milik pemerintah daerah sebagai objek Retribusi Daerah, sehingga tambahan aktivitas ekonomi tersebut belum mampu meningkatkan penerimaan retribusi secara signifikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan pembangunan belum sepenuhnya selaras dengan penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mengharapkan pembangunan mampu menciptakan manfaat ekonomi bagi daerah. Namun, manfaat tersebut belum tercermin pada peningkatan Retribusi Daerah. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membatasi jenis Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menangkap tambahan aktivitas ekonomi yang dihasilkan PSN melalui penerimaan retribusi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Proyek Strategis Nasional saja belum cukup untuk memperkuat pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dampak fiskal pembangunan strategis tampaknya lebih bergantung pada sejauh mana aktivitas ekonomi yang dihasilkan mampu meningkatkan pemanfaatan layanan dan fasilitas publik yang menjadi objek Retribusi Daerah. Akibatnya, peningkatan aktivitas ekonomi akibat PSN belum secara otomatis diikuti oleh peningkatan penerimaan Retribusi Daerah maupun Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Sunaningsih dan Nugraheni (2022), Harsono et al. (2024), serta Afriyana et al. (2023) yang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak selalu meningkatkan penerimaan pemerintah daerah apabila manfaat ekonominya belum terhubung dengan aktivitas ekonomi lokal maupun pelayanan publik. Sebaliknya, hasil penelitian ini berbeda dengan

temuan Sihombing et al. (2024) yang menemukan bahwa pembangunan infrastruktur mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa dampak fiskal pembangunan tidak bersifat seragam, melainkan bergantung pada karakteristik infrastruktur serta keterkaitannya dengan pelayanan publik daerah. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa keberadaan PSN dalam penelitian ini belum mampu memperkuat pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini mengonfirmasi *Agency Theory* yang menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah pusat berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan pemerintah daerah berorientasi pada peningkatan penerimaan melalui optimalisasi pelayanan publik sebagai objek Retribusi Daerah. Ketika manfaat pembangunan lebih banyak tercermin pada peningkatan investasi daripada pemanfaatan layanan publik, manfaat fiskal yang diterima pemerintah daerah menjadi tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan nasional belum tentu diikuti oleh peningkatan kapasitas fiskal daerah apabila aktivitas ekonomi yang tercipta belum terintegrasi dengan pelayanan publik daerah.

Sementara itu, hasil penelitian ini belum sepenuhnya mengonfirmasi *Stewardship Theory*. Dalam perspektif *Stewardship Theory*, pembangunan seharusnya mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi daerah, termasuk melalui peningkatan kualitas serta pemanfaatan pelayanan publik yang dikelola

pemerintah daerah. Namun, tidak signifikannya pengaruh moderasi PSN menunjukkan bahwa keberadaan Proyek Strategis Nasional belum mampu mendorong peningkatan pemanfaatan fasilitas dan layanan pemerintah daerah yang menjadi sumber Retribusi Daerah. Dengan demikian, keberhasilan PSN tidak hanya perlu diukur dari jumlah proyek yang telah dilaksanakan, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan aktivitas ekonomi yang terintegrasi dengan pelayanan publik daerah sehingga mampu mendukung peningkatan kapasitas fiskal pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Tidak signifikannya pengaruh moderasi PSN menunjukkan bahwa keberadaan proyek strategis secara kuantitatif belum sepenuhnya menggambarkan keterhubungan pembangunan dengan kapasitas fiskal daerah. Indikator jumlah PSN menunjukkan intensitas pembangunan yang berlangsung di suatu daerah, namun belum sepenuhnya mencerminkan perbedaan karakteristik, tahapan pelaksanaan, maupun keterkaitannya dengan aktivitas ekonomi dan pelayanan publik daerah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa manfaat pembangunan strategis terhadap kapasitas fiskal daerah tidak hanya ditentukan oleh jumlah proyek yang dilaksanakan, tetapi juga oleh berbagai faktor lain yang memengaruhi kemampuan daerah dalam mengoptimalkan manfaat ekonomi yang dihasilkan menjadi penerimaan daerah.